



Judul : Jurus Lama Kabinet Baru
Tanggal : Jumat, 01 November 2024
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 6

Jurus Lama Kabinet Baru

Handi Risza

Wakil Rektor Universitas Paramadina

Mengutip kata-kata bijak Sun Tzu, "jangan pernah menggunakan jurus yang sama untuk situasi dan kondisi yang berbeda".

Itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan komposisi menteri yang akan mengisi pos kementerian bidang ekonomi kabinet Prabowo-Gibran. Diprediksi kondisi ekonomi ke depan tidak akan banyak mengalami perubahan mengingat wajah-wajah lama masih mendominasi komposisi kabinet.

Tim ekonomi yang seharusnya memunculkan optimisme jurus baru untuk menghadapi persoalan ekonomi dan keuangan global yang masih diselimuti risiko ketidakpastian yang tinggi dan persoalan stagnasi pertumbuhan ekonomi, justru mengundang kekhawatiran tersendiri untuk dapat keluar dari perangkap kebijakan ekonomi pemerintahan sebelumnya.

Jika dicermati, jurus utama yang dipakai Menteri Keuangan dalam sepuluh tahun terakhir adalah menggunakan instrumen utang dalam menjaga keseimbangan fiskal jangka pendek. Konsekuensinya, terdapat risiko dalam jangka panjang.

Bahkan, tahun 2020, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah memperingatkan beberapa indikator kerentanan utang telah melampaui batas praktik terbaik yang direkomendasikan lembaga internasional.

Kebijakan yang menggunakan instrumen utang bisa dilacak dalam 10 tahun terakhir.

Ketika baru dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2014 menggantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Joko Widodo (Jokowi) diwarisi utang sebesar Rp 2.608 triliun. Angka itu sama dengan 24,7 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Pada akhir masa jabatan pertama Presiden Jokowi tahun 2019, utang pemerintah meningkat tajam sebesar 83 per-

sen, menjadi Rp 4.786,58 triliun atau 30,6 persen dari PDB.

Lonjakan utang yang besar juga terjadi pada periode kedua pemerintahan Jokowi. Pada akhir Agustus 2024, utang pemerintah pusat sudah mencapai Rp 8.461,93 triliun atau mengalami lonjakan sebesar 224 persen dari periode terakhir Presiden SBY dan 76,7 persen dari periode pertama Presiden Jokowi.

Kenaikan jumlah utang ini ikut meningkatkan rasio utang pemerintah terhadap PDB, dari semula 30,6 persen dari PDB pada 2019 menjadi 38,49 persen dari PDB pada Agustus 2024.

Pemerintahan Presiden Prabowo direncanakan akan menambah utang Rp 775,86 triliun. Hal itu tercantum dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang sudah disetujui oleh DPR periode sebelumnya. Besarnya utang baru tidak bisa dilepaskan dari utang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp 800,33 triliun, terdiri dari SBN Rp 705,5 triliun dan pinjaman Rp 94,83 triliun.

Hal inilah yang kemudian membuat BPK pada 2020, dalam Laporan Hasil Reviu atas Kesinambungan Fiskal, memperingatkan pemerintah bahwa terdapat risiko yang besar, indikator kerentanan utang yang meliputi rasio *debt service* terhadap penerimaan, rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan, dan rasio utang terhadap penerimaan sebagai bagian dari pengelolaan fiskal telah melampaui batas praktik yang direkomendasikan lembaga internasional.

Jebakan stagnasi ekonomi

Tambunnya kabinet yang dibentuk oleh Presiden Prabowo juga menimbulkan keresauan tersendiri di tengah semangat reformasi birokrasi dan transformasi struktural yang digagas pemerintahan sebelumnya.

Presiden Prabowo memecah banyak kementerian. Sudah bisa dipastikan tahun pertama sejumlah kementerian yang dipecah akan menghadapi persoalan penataan birokrasi dan administrasi yang pelik. Ini akan berdampak pada efektivitas dan efisiensi kerja pemerintahan yang akan terganggu.

Bappenas pada tahun 2020 sudah mengidentifikasi hal yang paling menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. (*the most binding constraints*).

Pertama, regulasi yang tumpang tindih dan relatif tertutup. Kedua, rendahnya kualitas institusi, terutama pada praktik koordinasi kebijakan.

Selain dua isu itu, hasil diagnosis juga menemukan tiga masalah yang menjadi *binding constraint*, yaitu masih rendahnya ketersediaan tenaga kerja terampil, infrastruktur yang belum sepenuhnya mampu membangun konktivitas, serta rendahnya penerimaan perpajakan dan belanja negara.

Jurus tim ekonomi pemerintahan Jokowi, yang memiliki kelemahan, seperti tetap dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo, terlihat dari kebijakan industri yang dihasilkan dalam satu dekade terakhir.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI mencatat rata-rata pangsa manufaktur terhadap PDB di periode kedua Presiden Jokowi mencapai level terendah. Kondisi ini diperkuat dengan data OECD mengenai nilai tambah manufaktur sebagai bagian dari produksi, yang juga menunjukkan tren penurunan di Indonesia dalam satu dekade terakhir.

Sejak Presiden Jokowi menjabat pada 2014, rata-rata nilai tambah manufaktur anjlok menjadi sekitar 39,12 persen hingga tahun 2020, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri (43,94 persen)

dan Presiden SBY (41,64 persen). Kondisi inilah yang memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di kisaran 5 persen.

Industri tidak dapat lagi berperan sebagai basis pendorong utama perekonomian atau dengan kata lain kontribusi sektor industri terhadap PDB nasional terus mengalami penurunan.

Hilirisasi

Jurus hilirisasi yang menjadi kebijakan unggulan pemerintah sebelumnya juga akan terus dilanjutkan. Kebijakan hilirisasi sesungguhnya belum memberikan dampak berganda (*multiplier effect*) yang besar bagi perekonomian nasional. Bahkan, tingkat kemiskinan di sekitar tambang masih tinggi.

Keuntungan dari hilirisasi nikel juga lebih banyak dinikmati oleh asing karena smelter yang aktif beroperasi sebagian besar dimiliki oleh investor dari China. Tim ekonomi pemerintahan Prabowo harus mengemukakan jurus baru dalam mengatasi persoalan tersebut.

Keberlanjutan pembangunan IKN juga akan menjadi batu sandungan bagi pemerintahan Prabowo. Besarnya alokasi anggaran pembangunan IKN akan menjadi beban fiskal tersendiri bagi pemerintah dalam lima tahun ke depan.

Periode pertama pemerintahan Prabowo, anggaran pembangunan IKN sudah dialokasikan sebesar Rp 15 triliun. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo harus punya jurus tersendiri untuk memutuskan nasib keberlanjutan pembangunan IKN hingga lima tahun masa kepresidenannya.

Keinginan Presiden Prabowo untuk meraih pertumbuhan ekonomi 8 persen hampir sama dengan keinginan Presiden Jokowi ketika memulai pemerintahannya yang menargetkan pertumbuhan 7 persen.

Namun, jurus Presiden Jo-

kowi sampai hari ini tidak berhasil mencapai angka yang ditargetkan tersebut, bahkan terjebak pada angka 5 persen.

Jurus yang sama tampaknya akan kembali dilanjutkan oleh Presiden Prabowo dengan tim ekonominya. Kembali ke peringatan Sun Tzu, jangan sampai menggunakan jurus yang sama dalam menghadapi medan pertempuran yang berbeda. Hasilnya akan sama.

Rubrik ini menerima artikel dengan topik aktual, relevan dan menyangkut kepentingan publik. Artikel hanya dikirim ke Opini Kompas. Panjang artikel maksimal 5.000 karakter dengan spasi. Kirim ke www.kompas.id/kirim-opini

POJOK

Demokrasi nirkritik bukan demokrasi. Bukannya dari dulu begitu?



Awan hujan mulai terbentuk, suhu diprediksi mendingin. Ini yang ditunggu-tunggu.



Jakarta siapkan infrastruktur pengendali banjir
Semoga sukses....

Mang Uil